### BAB I

### **PENDAHULUAN**

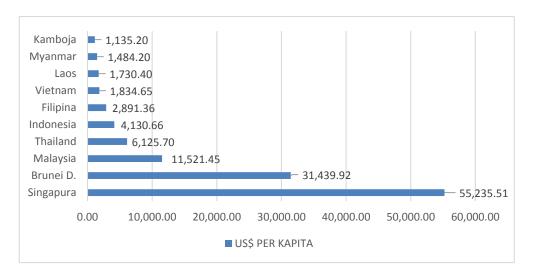
## 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah perekonomian Indonesia dimulai dari sesudah adanya krisis finansial Asia di periode 2000-2004. Pemulihan ekonomi Indonesia terjadi dengan rata-rata pertumbuhan PDB (Produk Nasional Bruto) pada 4.6% pertahun. Setelah itu, pertumbuhan PDB sempat berakselerasi dengan pengecualian di tahun 2009 akibat guncangan dan ketidakjelasan finansial global terjadinya arus modal keluar dari Indonesia maka pertumbuhan PDB Indonesia jatuh sekitar 4.6% walaupun angka tersebut terbilang bagus. Periode pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan antara tahun 2000-2011 disebabkan oleh hal yang saling berkaitan yaitu meningkatnya konsumsi rumah tangga dan ledakan harga komoditas pada tahun 2000-an (2000s commodities boom).

Walaupun sempat mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak krisis finansial Asia, ledakan harga komoditas pada tahun 2000-an juga dapat dianggap sebuah peluang yang terlewatkan karena pemerintah Indonesia gagal mengurangi ketergantungan negaranya terhadap ekspor komoditas (yang mentah). Ketika harga komoditas menurun setelah tahun 2011 di tahun yang sama pula sampai tahun 2015 Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan PDB turun dibawah 5.0% (tahun ke tahun) yang mana hal ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan.

Pertumbuhan ekonomi menurut Jhingan (2010, hlm. 57) dalam Ravindra (2014, hlm. 1) yaitu kemampuan jangka panjang suatu negara untuk menyediakan

berbagai jenis-jenis barang ekonomi kepada warga negaranya. Kemampuan ini tumbuh seiring dengan berkembangnya teknologi dan penyesuaian lembaga yang dibutuhkan. Pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa besar keberhasilan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengalami pertambahan jumlah dan kualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dilihat dari PDB suatu negara dan tingginya nilai PDB dapat diasumsikan bahwa kondisi perekonomian suatu negara tersebut baik. Menurut Tarigan (2005, hlm. 46) dalam Ravindra (2014, hlm. 1) pertumbuhan ekonomi adalah keadaan dimana adanya pertambahan pendapatan pada masyarakat secara menyuluruh di wilayah tertentu atau bisa dikatakan kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Membandingkan nilai PDB per kapita beberapa negara akan memberikan gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi. Setiap negara pada umumnya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang pesat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.



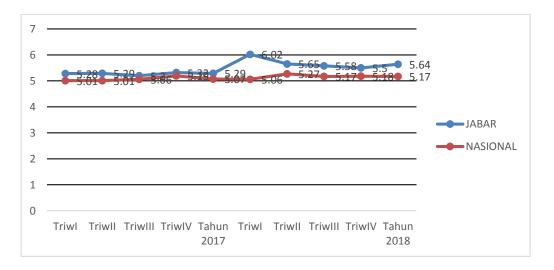
Gambar 1.1 PDB per Kapita Negara-Negara ASEAN 2017

Sumber: tingkatan pdb asean 2017, Kata Data.

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US\$ 1,02 triliun atau setara Rp. 13.588 triliun. Namun, karena jumlah penduduk yang banyak membuat PDB per kapita Indonesia terkalahkan oleh Singapura, Malaysia maupun Thailand.

Berdasarkan gambar diatas 1.1 PDB per kapita Indonesia pada 2017 sebesar US\$ 4.130 atau Rp 51.98 juta berada diposisi ke 5 dari 10 negara anggota ASEAN seperti terlihat pada grafik diatas. Posisi Indonesia berada di Bawah Thailand dengan PDB perkapita US\$ 6.125. sementara Singapura merupakan negara dengan PDB per kapita terbesar yakni US\$ 55.235.

Pembangunan ekonomi dalam Provinsi Jawa Barat menunjukan tingkat pertumbuhan yang secara menerus mengungguli laju petumbuhan ekonomi Nasional pada periode 2017-2018. Ekonomi Jawa Barat ditahun 2018 tumbuh sebesar 5.54% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 5.29% namun tetap diatas tingkat nasional yang hanya tumbuh sebesar 5.17%.



Gambar 1.2 Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat periode 2017-2018

Sumber: kajian fiskal regional 2018, kemenkeu direktorat jendral perbendaharaan

Berdasarkan gambar 1.2 pergerakan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dari tahun 2018 cukup stabil, dimana nilai tertinggi ada pada Triwulan I yaitu 6.02% dan tetap mengungguli pertumbuhan ditingkat nasional. Pada pertumbuhan Triwulan I ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan kebutuhan kampanye Pilgub serta Pilkada lalu persiapan Ramadhan dan Idul Fitri. Disamping itu, pelaksanaan ASEAN Games yang berlangsung di Triwulan III 2018 dan pembangunan infrastruktur pemerintah yang sudah ditahap penyelesaian, seperti Bandara Kertajati yang rencananya akan difungsikan sebagai pemberangkatan ibadah haji tahun 2018. Dalam Triwulan II tahun 2018 laju pertumbuhan mengalami perlambatan namun tetap tumbuh sebesar 5.65%. Perlambatan perekonomian ini salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan hari libur lebaran yang panjang, yang mana hal itu membuat proses produksi tertahan. Perlambatan perekonomian ini terus berlanjut hingga Triwulan III dan IV tahun 2018 yang disebabkan oleh penurunan permintaan masyarakat, pada Triwulan II terdapat

momen bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri serta Pilkada secara serentak 2018. Kinerja pertanian terpantau mengalami perlambatan akibat musim kemarau panjang yang turut mempengaruhi perlambatan perekonomian di Provinsi Jawa Barat.

Dari sisi lapangan usaha untuk mengetahui sektor unggulan yang berada di Jawa Barat yaitu dengan menggunakan alat *Analisis Location Quotient* (LQ) yang mana suatu indikator yang menunjukan kekuatan peranan suatu sektor di daerah (provinsi) dan dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di tingkat yang lebih luas (nasional) sebagai refrensi.

Tabel 1.1 Location Quotient sektor-sektor PDRB Jawa Barat

Lanangan Usaha		Location Quotient												
Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	Rata-rata	Keterangan								
Industri Pengolahan	1,95	1.94	1,95	1,98	1,96									
Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan sepeda Motor	1,14	1,13	1,12	1,11	1,12	Sektor Basis Unggulan								
Transportasi dan Pergudangan	1,16	1,17	1,12	1,1	1,14	or is								
Jasa Lainnya	1,2	1,2	1,2	1,17	1,19									
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,93	0,95	0,96	0,95	0,94									
Konstruksi	0,81	0,8	0,8	0,8	0,8									
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	0,8	0,82	0,84	0,85	0,83	No								
Informasi dan Komunikasi	0,72	0,74	0,75	0,76	0,74	Sektor Non basis/Tidak Potensial								
Real Estate	0,37	0,38	0,39	0,41	0,39	asis								
Jasa Pendidikan	0,83	0,85	0,88	0,88	0,86	Sektor 5/Tidak								
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,66	0,68	0,68	0,68	0,67	tor lak								
Jasa Perusahaan	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	Pote								
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,57	0,58	0,56	0,55	0,56	ensi								
Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,25	0,24	0,23	0,24	ลไ								
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,61	0,62	0,61	0,61	0,61									
pengadaan Listrik dan Gas	0,45	0,44	0,38	0,36	0,41									
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	0,58	0,57	0,58	0,55	0,57									

Sumber: kajian fiskal regional 2018, kemenkeu direktorat jendral perbendaharan.

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, terdapat 4 lapangan usaha yang memiliki nilai LQ diatas 1 yang dapat dikategorikan sebagai sektor basis atau sektor unggulan di Jawa Barat yang terdiri dari Industri pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor, Trasportasi dan Pergudangan dan Jasa Lainnya. Sektor basis menunjukan bahwa produksi output sektor tersebut mengalami kelebihan output produksi yang dibutuhkan dan memberikan sumbangan output bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor-sektor inilah yang yang memiliki keunggulan komparatif sehingga menjadi sektor kunci untuk dikembangkan.

Dalam memperjuangkan percepatan ekonomi pembangunan pada ekonomi industri disuatu daerah, pemerintah menggunakan taktik pergesaran sektor pertanian ke sektor industri yang terjadi seiring dengan berjalannya zaman dan tuntutan perkembangan pembangunan di suatu negara. Dengan ini pemerintah memiliki keikutsertaan yang besar untuk mempermudah modal asing masuk ke dalam negeri dan mampu membuka lapangan pekerjaan baru untuk penduduk di daerah yang menjadi tempat terjadinya pembangunan industri.

Kegiatan perindustrian di Jawa Barat cenderung berlokasi di dalam dan disekitar kota, Hal ini karena di dalam dan sekitar kota sudah terdapat sarana dan prasarana yang cukup memadai. Pola pemusatan industri-industri pada suatu daerah seperti ini dinamakan aglomerasi industri. Menurut Nuryadin dan Sodik (2007, hlm. 118) aglomersi industri cenderung menghasilkan perbedaan spasial dalam tingkat pendapatan antar wilayah. Hal ini terjadi karena, wilayah yang banyak mempunyai industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan

wilayah yang hanya memiliki sedikit industri pengolahan. Keuntungan dari aglomerasi industri sendiri berupa produktivitas dan pendapatn yang lebih tinggi, menarik investasi baru, perkembangan teknologi yang baik, serta memiliki tenaga kerja terdidik dan terampil.

Menurut Bhakti Setiawan dan Abdul Hakim (2013, hlm. 20) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal meskipun tidak mengukur semua lingkup utama pembangunan manusia yang dinilai bisa menunjukan kemampuan dasar penduduk. Dalam IPM terdapat tiga kemampuan dasar yang terdiri dari umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan serta jaringan terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menuju standar hidup layak.

Pasar tenaga kerja menurut Mankiw (2006, hlm. 487) dalam Sulistiawati (2012, hlm. 196) mengatakan perekonomian dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, akan tetapi permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (derived demand) dimana permintaan tenaga kerja sangat bergantung pada permintaan atas output yang dihasilkan. Suatu proses produksi agar menghasilkan barang dan jasa, tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Demikian hubungan antara produksi barang serta permintaan tenaga kerja menjadi faktor dalam menentukan tingkat upah.

Menurut Sumarsono (2009, hlm. 151) dalam Dwi Cahya (2016, hlm. 5) upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pegawai untuk suatu pekerjaan atau jasa yang sudah dilakukan maupun akan dilakukan

dalam bentuk uang. Penetapan tingkat upah minimum secara tidak langsung akan mempengaruhi PDRB daerah, sehingga pemerintah dalam menetapkan tingkat upah perlu mempertimbangkan beberapa dampak yang akan ditimbulkan baik dalam penyerapan tenaga kerja, tingkat investasi, dan pertumbuhan PDRB.

Berdasarkan uraian diatas, pengaruh aglomerasi industri, indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat upah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai masukan dalam pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang tepat guna mengatasi permasalahan ekonomi khususnya pada Provinsi Jawa Barat. Penulis tertarik untuk menganalisa keadaan tersebut dengan judul penelitian "Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Tingkat Partsipasi Angkatan Kerja, Tingkat Upah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Periode 2005-2020".

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh Aglomerasi Industri, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Upah dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat periode 2005-2020?
- Bagaimana pengaruh Aglomerasi Industri, Tingkat Partisipasi Angkatan
  Kerja, Tingkat Upah dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-

bersama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat periode 2005-2020?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

- Mengetahui bagaimana pengaruh Aglomerasi Industri, Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Upah dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat periode 2005-2020.
- Mengetahui bagaimana pengaruh Aglomerasi Industri, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Upah dan Indeks Pembangunana Manusia secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat periode 2005-2020.

## 1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini semoga dapat berguna bagi semua pihak, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

# 1. Bagi Akademis

Penelitian ini bermaksud untuk menambah pengetahuan dan manfaat serta wawasan dengan pihak terkait tertentu untuk pengkajian lanjutan mengenai analisis aglomerasi industri, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat upah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat periode 2005-2020.

### 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi input dan dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengacu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

## 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan wawasan serta pengetahuan, mengenai analisis pengaruh aglomerasi industri, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat upah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat periode 2005-2020. Penelitian ini pula digunakan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

### 1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder, data sekunder diperoleh dari dokumentasi, studi kepustakaan melalui bantuan dari media cetak dan media internet. Lokasi penelitian ini pula diperoleh dari medi cetak dan media internet yakni diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Kata Data, Data Jabar dan Kementrian Keuangan.

### 1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021/2022, dimulai sejak bulan Oktober 2021 dengan pengajuan judul kepada Pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan dan penulis memperkirakan penelitian ini selesai sampai bulan Desember 2021, Berikut adalah matrik jadwal penelitian:

**Table 1.2 Jadwal Penelitian** 

										В	ular	ı/Ta	ahuı	n 20	)21/	202	22								
No. Kegiatan	Oktober			November			Desember				Januari				Februari				Maret						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul Dan Pengumpulan Data																								
2.	Penyusunan Usulan Penelitian																								
3.	Pengajuan Usulan Penelitian																								
4.	Sidang Usulan Penelitian																								
5.	Analisis Data																								
6.	Penyusunan Skripsi																								
7.	Sidang Komprehensif																								